

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami masalah kependudukan, jika jumlah pertumbuhan penduduk tidak terkontrol dengan baik maka akan menimbulkan berbagai permasalahan yang berujung pada masalah kesehatan, meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat.¹

Program KB merupakan sebuah strategi yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk. Program KB sudah ada sejak tahun 1957 dengan nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memelopori gerakan KB di Indonesia, melalui PKBI cikal bakal perkembangan program KB dimulai.²

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/kesra/X/1968. Pemerintah mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). LKBN merupakan lembaga yang berstatus sebagai lembaga semi pemerintah. Pemerintah kemudian menetapkan bahwa program KB adalah sebagai bagian dari pembangunan lima tahun pertama. Program KB dijadikan

¹ Taufik Abdullah, dkk. *Indonesia Dalam Arus Sejarah 8: Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: PT. Lehtiar Baru Van Hoeve, 2012, hlm. 187.

² Puri Kusuma, dkk. "Kelembagaan dan Capaian Program Keluarga Berencana (KB): dari Sentralisasi ke Desentralisasi". Bogor: *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2019, Vol. 14 No.1, hlm. 2.

sebagai program nasional dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menggantikan LKBN. Secara resmi, program KB mulai dilaksanakan pada tahun 1970 berdasarkan struktur organisasi BKKBN yang dibentuk atas dasar keputusan Presiden No. 8 tahun 1970.³

Tugas pokok BKKBN adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk itu BKKBN bertugas mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kelurahan atau desa. Selain itu BKKBN bertugas dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang mendukung program KB nasional secara menyeluruh dan terpadu.⁴

Selama beberapa dekade terakhir yaitu pada Repelita 1, kebijakan kependudukan difokuskan pada penurunan tingkat kelahiran yang merupakan tugas pertama program nasional KB. Dalam Repelita I yaitu pada tahun 1969–1974 disebutkan bahwa tahap awal program KB adalah bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat dengan mengurangi tingkat kelahiran bayi, terutama dikota-kota besar seperti Jawa dan Bali, kemudian pada Repelita II tahun 1974-1979 program KB semakin diperluas untuk sepuluh provinsi yang ada diluar pulau Jawa dan Bali, sepuluh provinsi tersebut yaitu Aceh, Sumatra Utara,

³ Danik Isnaini, “Perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Madya Yogyakarta Tahun 1970-1998”. Yogyakarta: *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 2018, Vol. 3 No. 3, hlm. 390.

⁴ Yusvenni Desmura, “Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Tiakar Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota 1976-1994”. Padang: *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 1999, hlm . 1.

Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.⁵

Pengembangan program KB ke daerah Sumatra Barat telah dimulai sejak tahun 1974 yang bertepatan dengan tahun pertama tahap pembangunan lima tahun kedua.⁶ Kemudian untuk wilayah Kota Pariaman dalam pengembangan KB tidak diketahui kapan pastinya program KB dilaksanakan, namun yang pasti semenjak Kota Pariaman resmi berdiri sebagai kota otonom dari hasil Pemekaran Kabupaten Padang Pariaman melalui Undang-Undang No 12 tahun 2002, program KB sudah ada dan telah dijalankan dengan melakukan pendekatan komunikasi kepada masyarakat setempat untuk mengajak ber KB.⁷

Selama beberapa dekade terakhir program KB mengalami kemacetan (*stagnasi*). Karena kemacetan tersebut akibatnya penggunaan alat kontrasepsi menurun, jumlah masyarakat meningkat dan meningkatnya jumlah kematian ibu. Oleh karena itulah BKKBN kembali menyusun program yang diharapkan dapat menjadi penerus serta memperbaiki program KB sebelumnya. Program tersebut adalah Kampung KB merupakan suatu wadah untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta program pembangunan lainnya dilini lapangan.⁸

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ Wawancara dengan Marlinda, mantan petugas KB Desa Naras 1, pada tanggal 18 Mei 2023. Di Kantor Desa Naras 1.

⁸ Helmey Fuadi, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi dan Kearifan Lokal (Studi Khusus di Komunitas Kampung KB Dusun Telagawaru Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombokbarat Provinsi Nusa Tenggara Barat)". Nusa Tenggara Barat: *Jurnal Indonesian Social dan Humanities*, 2021, Vol. 2. No. 1, hlm. 63-64.

Berdasarkan Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta berdasarkan surat kepala BKKBN pusat No.046/BL/200/B4/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal penancangan dan pembentukan kampung KB di seluruh Indonesia, kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk terwujudnya cita-cita pembangunan Indonesia yang terdapat dalam Nawacita Pemerintahan periode 2015-2019 terutama pada agenda prioritas ke 3 yaitu “memulai pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, serta agenda prioritas ke 5 yaitu “meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan agenda prioritas ke 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa”.⁹

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK di lini lapangan. Peran Kampung KB tidak hanya menekan laju pertumbuhan penduduk dan penggunaan alat kontrasepsi, akan tetapi Kampung KB menjadi program pembangunan pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program lainnya. Kampung KB dilaksanakan pada setiap wilayah yang ada di Indonesia sesuai dengan kriteria Kampung KB. Provinsi Sumatra Barat juga menerapkan program Kampung KB khususnya di Desa Naras 1.¹⁰

Desa Naras 1 merupakan desa yang berada di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Jumlah penduduk Desa Naras 1 pada tahun 2015 berjumlah 989 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.347 hal tersebut menunjukkan bahwa

⁹BKKBN. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2016, hlm. 4.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 7.

jumlah penduduk Desa Naras 1 mengalami peningkatan penduduk yang sangat drastis yaitu bertambah dua kalilipat dari tahun sebelumnya dalam kurun waktu 1 tahun.¹¹

Kota Pariaman sudah berupaya dalam mensukseskan program Kampung KB yang telah di laksanakan pada tahun 2016. Desa Naras 1 merupakan desa pertama yang terpilih sebagai desa percontohan Kampung KB di wilayah Kota Pariaman. dan pada tahun 2018 jumlah kampung KB bertambah sebanyak 6 titik lokasi kampung KB yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Pariaman diantaranya: Desa Naras 1, Kelurahan Karan Aur, Desa Kampung Baru Padusunan, Desa Tungkal Utara, Desa Taluak, dan Desa Punggung Lading.¹²

Program Kampung KB di wilayah Kota Pariaman khususnya Desa Naras 1, masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, banyak kendala yang dihadapi diantaranya masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program yang ada dalam Kampung KB, kemudian kondisi lingkungan yang belum tertata dengan baik, dan keterlibatan lintas sektor yang masih kurang.¹³

Tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan program Kampung KB serta dinamika yang terjadi pada saat program kampung KB ini dijalankan di wilayah Kota Pariaman khususnya di Desa Naras 1. Mengetahui bahwa peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mensukseskan program Kampung KB ini, karena masyarakat menjadi peran utama dalam pelaksanaan program Kampung KB ini, yang mana dikelola serta

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. 2016. *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka tahun 2017*. Pariaman: BPS Kota Pariaman.

¹² Wawancara dengan Rijalul Fitra (PKB) di Kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pariaman Utara pada tanggal 30 Mei 2023.

¹³ *Ibid.*

diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan serta memberikan kemudahan proses pelayanan sehingga terwujudnya keluarga yang sejahtera. Oleh sebab itu penulisan skripsi ini diberi judul **“Program Kampung Keluarga Bencanaan (KB) di Desa Naras 1 Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman 2016-2020”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam sejarah terbagi dua yaitu batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial merupakan batasan tempat dalam penelitian, sedangkan batasan temporal adalah batasan waktu penelitian.

Batasan spasial dari penelitian ini adalah di Desa Naras 1, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Alasan mengambil Desa Naras 1 sebagai tempat penelitian karena Desa Naras 1 merupakan desa pertama yang terpilih sebagai desa percontohan kampung KB di wilayah Kota Pariaman. Kemudian Batasan temporal dari penelitian ini adalah dari tahun 2016-2020.

Alasan mengambil tahun 2016 sebagai batasan awal penelitian karena pada tahun ini program kampung Keluarga Berencana (KB) resmi dilaksanakan di Indonesia dan di Desa Naras 1 khususnya, sedangkan untuk batasan akhir diambil tahun 2020 karena BKKBN telah mengubah nomenklatur dari kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi kampung Keluarga Berkualitas (KKB).

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Desa Naras 1 Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman?
2. Bagaimana Awal Terbentuknya Program KB di Desa Naras 1?
3. Mengapa pelaksanaan program Kampung KB ada yang terealisasi dan tidak terealisasi di Desa Naras 1?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji gambaran umum Desa Naras 1 Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman
2. Membahas Awal Terbentuknya Program KB di Desa Naras 1
3. Mengkaji pelaksanaan program Kampung KB ada yang terealisasi dan tidak terealisasi di Desa Naras 1

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Dari segi akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan sejarah terkhusus bidang sejarah pembangunan dari segi kependudukan, dan manfaat praktis untuk melihat perkembangan pembangunan nasional melalui program kampung KB di Desa Naras 1.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan dalam penelitian ini membutuhkan hasil karya penelitian orang lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal yang dapat menjadi penunjang

dalam penulisan ini seperti buku-buku, arsip, jurnal, dan sumber-sumber lain dapat diperoleh dari informan melalui wawancara. Beberapa kajian yang dapat mendukung dalam penulisan ini antara lain:

Buku karya Noviyanti Rahardjo Putri, dkk dengan judul *Pelayanan Keluarga Berencana*. Buku ini menjelaskan tentang definisi kependudukan, keluarga berencana, dan kontrasepsi. Indonesia telah mengenal program KB saat era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto di masa Orde Baru dan telah dipikirkan dokter Indonesia sejak tahun 1950-an. Program Keluarga Berencana (*Family Planning, Planned Parenthood*) atau sering disebut program KB didefinisikan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dengan menggunakan alat pencegah kehamilan yaitu alat kontrasepsi.¹⁴

Buku karya Imelda Hutasoit, dengan judul *Pengantar Ilmu Kependudukan*. buku ini memberikan penjelasan tentang studi kependudukan. Dalam buku ini terdapat beberapa penjelasan seputar kependudukan yang mempelajari dinamika kependudukan dimana dalamnya meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi.¹⁵

Buku Pedoman Kampung KB dengan judul *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Buku ini disusun oleh BKKBN sebagai pedoman dalam membentuk Kampung KB. Buku ini menjelaskan tentang tatacara pembentukan dan pengelolaan Kampung KB. Dengan adanya program Kmapung KB diharapkan terjalin

¹⁴ Noviyanti Rahardjo Putri, dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2018.

¹⁵ Imelda Hutasoit. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung: Alfabeta Mantra, 2017.

keterpaduan yang sinergi antara sektor pembangunan dalam penerapannya secara nyata dan berkualitas.¹⁶

Skripsi Yusvenni Desmura menulis tentang “Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Tiakar Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota (1976-1994)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan program KB di Desa Tikar dan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah di bidang kependudukan khususnya di tingkat pedesaan di Sumatra Barat.¹⁷

Tulisan Yulian Widya Saputra, dkk yang berjudul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda”. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan program Kampung KB di Kota Samarinda kemudian tulisan ini memfokuskan pada bentuk-bentuk implementasi program Kampung KB di Koata Samarinda. Penelitian ini bersifat dekriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁸

Tulisan Kiki Endah dan Windu Abdul Kholiq yang berjudul “Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera (Studi Desa Babakan Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran)”. Menjelaskan pelaksanaan program Kampung KB dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera.¹⁹

¹⁶ BKKBN. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2016.

¹⁷ Yusvenni Desmura, “Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Tiakar Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota 1976-1994”. Padang: *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 1999.

¹⁸ Yulian Widya Saputra dkk. “Implementasi Program Kamampung Keluarga Berencana (KB) di Koata Samarinda”. Kalimantan Timur: *Jurnal Georafflesia*, 2020, Vol 4 No. 6.

¹⁹ Kiki Endah dan Windu Abdul Kholiq, (2019). “Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Tulisa Novi Widianti yang berjudul “Sejarah Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Jombang Tahun 1990-1995”. Membahas tentang respon masyarakat Jombang terhadap program Keluarga Berencana serta untuk menganalisis dampak program Keluarga berencana terhadap Laju pertumbuhan penduduk, kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Jombang tahun 1990-1995. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.²⁰

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini dapat di kategorikan sebagai sejarah sosial khususnya sejarah kependudukan. Sejarah sosial menurut Kuntowijoyo adalah sejarah yang objek kajiannya masyarakat.²¹ Selain itu, sejarah juga melihat manusia dari segi waktu. Dalam waktu terjadi empat hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan.²²

Dalam prihal pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan nasional mencakup semua mitra dan aspek kehidupan termasuk kuantitas penduduk, kualitas keluarga serta persebaran penduduk untuk mewujudkan suatu masyarakat

Anak (KBP3A) Dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera (Studi desa babakan Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran)”. Universitas Galuh: *Jurnal Moderat*, 2019, Volume 5 No. 2 .

²⁰ Novi Widianti, (2015). "Sejarah Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Jombang Tahun 1990-1995". Surabaya: *Jurnal Avatara*, volume 3. Nomor 1 Maret 2015.

²¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hlm. 25.

²² *Ibid*, hlm. 27.

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam mencapai tujuan tersebut.²³

Menurut Siagian, pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, dan kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat, sedangkan definisi dari penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dalam kurun waktu enam bulan berturut-turut maupun lebih.²⁵

Indonesia merupakan negara ke 4 yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Masalah kependudukan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, salahsatunya Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu meningkatkan peforma agar dapat mengupayakan terkendalinya

²³ Almasri, dkk. “ Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan”. Laporan Penelitian. Riau: Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, 2014, hlm. 4.

²⁴ Siagian. *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994, hlm. 25.

²⁵ Nastiti Novia A, “Pengaruh Inflansi Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Samarinda”. Samarinda: *Laporan Penelitian*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, 2018, hlm. 4.

pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan cara membentuk program Kampung KB. Program Kampung KB merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nawacita ke 3, 5, dan 8 dengan mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera yang artinya kampung KB masuk kedalam program pembangunan nasional.²⁶

Berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 440/70/SJ tanggal 11 januari 2016 perihal penancangan dan pembentukan Kampung KB, dan surat kepala BKKBN pusat No. 046/BL/200/B4/2016 tanggal 12 januari 2016 perihal penancangan dan pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia. Kampung KB dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan catatan sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.
- b. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah baik itu pemerintah kota, kecamatan dan desa agar dapat memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB masing-masing.
- c. Adanya partisipasi masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam pengelolaan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB dan keterlibatan pihak swasta dalam penggarapan program pembangunan di Kampung KB sangat penting sebagai bentuk gotong royong dari semua pihak.²⁷

²⁶ Puri Kusuma Dwi Putri dkk. (2019). "Kelembagaan dan capaian program keluarga berencana (KB): dari era sentralisasi ke desentralisasi".Bogor: *Jurnal Kependudukan Indonesia*, volume 14. Nomor 1 Juni 2019, hlm. 6.

²⁷ BKKBN. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2016, hlm, 15.

Kampung merupakan salah satu bentuk pemukiman *urban* di Indonesia. kampung menjadi pusat pertumbuhan awal area kota dibentuk oleh konsep keruangan dalam kurun waktu yang sangat lama dan tempat bermukim mayoritas masyarakat pribumi. Status kampung memiliki kompleksitas yang rumit, terutama berkaitan dengan masa depan kampung dan upaya perbaikannya.²⁸ Sedangkan istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tanah tumpah darah dan perkataan desa hanya dipakai di daerah Jawa dan Madura, sedangkan daerah lain pada saat itu (sebelum masuknya Belanda) namanya berbeda, seperti *gampong* dan *meunasah* di Aceh, *huta* di Batak, *nagari* di Sumatra Barat, dan sebagainya. Sekalipun bervariasi, nama desa ataupun daerah hukum yang setingkat desa di Indonesia asas atau landasan hukumnya hampir sama, yaitu adat, kebiasaan, dan hukum adat.²⁹

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis. Tidak semua kampung bisa masuk program kampung KB, ada kriteria tertentu yaitu utama, wilayah, dan khusus. Kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata di tingkat kecamatan dimana desa itu berada serta jumlah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah. Kemudian dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di kawasan pesisir pantai, kawasan miskin

²⁸ Noor Hamidah, dkk. "Kampung Sebagai Model Permukiman Berkelanjutan di Indonesia". Yogyakarta: *Jurnal INERSIA*, 2016, Vol. 12 No.2, hlm. 115.

²⁹ Sunardjo. *Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 7.

(termasuk miskin perkotaan), daerah bantaran Kreta Api, dan sebagainya. Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai maka dari itu intervensi dari sektor lain sangat diperlukan.³⁰

Manfaat dari Kampung KB dapat menekan angka kemiskinan, serta peningkatan sektor pembangunan kepada masyarakat. Dapat dikatakan program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tidak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.³¹

Kelahiran atau persalinan merupakan proses melahirkan atau menghasilkan keturunan dimana orang tua dipisahkan dari keturunannya. Sedangkan Kontrasepsi berasal dari dua kata, yaitu *konta* yang artinya menolak dan *konsepsi* adalah pertemuan antara sel telur yang telah matang dengan sel sperma, jadi Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan.³²

³⁰ BKKBN. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2016, hlm. 20.

³¹ *Ibid.*

³² Prawirohardjo, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2006, hlm.20.

F. Metode Penelitian

Penelitian sejarah merupakan penelitian untuk mengungkap peristiwa dimasa lalu yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masalalu secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga dapat di tetapkan menjadi fakta-fakta untuk dapat membuat kesimpulan yang sifatnya masih hipotesis.³³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Beberapa tahapannya antara lain penentuan topik penelitian, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan sumber), interpretasi (analisis) dan penulisan sejarah atau biasa dikenal dengan istilah historiografi (penulisan sejarah).³⁴

Tahap pertama, Heuristik adalah tahap pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa sumber lisan maupun tulisan sumber lisan maupun tulisan bisa di dapatkan melalui dua yaitu dengan Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini, mengumpulkan teori dan konsep-konsep dari kerangka penulisan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian dan penelitian lapangan dilakukan degan wawancara pihak-pihak terkait seperti para perangkat desa, dan warga setempat.

³³Andra Tersiana. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, hlm. 46.

³⁴ Kuntowijoyo. (2003). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 69.

Tahap kedua, Kritik Sumber dilakukan untuk melihat kebenaran sumber atau mempertanyakan sumber apakah yang dapat di percaya untuk digunakan. Kritik sumber di dalam sejarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal merupakan cara untuk melakukan verifikasi atau pengujian kembali terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah yang memiliki tujuan untuk menguji keaslian dan kesahihan sumber sejarah. Sedangkan kritik internal nantinya akan bertujuan untuk menguji kredibilitas suatu sumber agar digunakan sebagai sumber sejarah.

Tahap ketiga, Interperstasi yaitu menganalisa sumber atau data yang dikumpulkan dan dikritik. Langkah ini merupakan suatu gabungan dari dua proses sebelumnya.³⁵ Menafsirkan sumber yang terkumpul agar menjadi fakta yang benar. Tahap keempat, historiografi merupakan penulisan secara sistematis dimana setelah melakukan beberapa tahap sebelumnya, maka yang selanjutnya ialah menulis hasil penelitiannya menjadi suatu penelitian utuh. Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk memahami sejarah.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan dirumuskan secara beraturan dan kronologis.

³⁵ Helius Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, hlm. 102.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang gambaran umum Desa Naras 1 mulai dari kondisi geografis, kependudukan dan membahas kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Naras 1.

Bab III membahas mengenai kemunculan program Kampung KB yang dimulai dari sebelum pembentukan Kampung KB hingga pada pembentukan Kampung KB.

Bab IV membahas pelaksanaan program Kampung KB yang ada di Kota Pariaman khususnya Kampung KB Desa Naras 1.

Bab V merupakan bab terakhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan. Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang diajukan di rumusan masalah sekaligus menyimpulkan hasil keseluruhan penelitian ini.